

Kewajiban notaris dalam pembuatan akta berita acara rapat umum pemegang saham RUPS (studi kasus keputusan majelis pengawas pusat tanggal 17 Juni 2014 Nomor : 02/B/MJ.MPPN/VI/2014 = Notary responsibility in making acts of general meeting of shareholders case study decision of center supervisor the board of notary dated June 17-2014 No 02/B/MJ.MPPN/VI/2014

Apresty Dwi Renjani, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20414787&lokasi=lokal>

---

Abstrak

Di Indonesia, notariat adalah suatu lembaga yang sudah dikenal dalam kehidupan kita di tanah air Indonesia. Dalam menjalankan tugasnya Notaris harus berpegangan pada kode etik profesinya. Notaris bertanggung jawab terhadap akta-akta yang dibuatnya, salah satunya adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Berdasarkan latar belakang tersebut, pokok permasalahan pada thesis ini adalah : Bagaimana Kewajiban Notaris dalam hal Pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT Panca Logam Makmur? Dan Bagaimanakah Penyelenggaraan dan Pembuatan akta oleh Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Panca Logam Makmur? Metode penelitian untuk membahas thesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan data sekunder berupa sumber hukum primer, sekunder, tersier, dan studi kepustakaan sebagai alat pengumpul data thesis ini.

Hasil analisa menyimpulkan bahwa Notaris tidak melakukan kewajibannya sebagai dalam penyelenggaraan dan pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham. Notaris dalam hal ini tidak saksama, dan amanah dalam menjalankan kewajibannya seperti apa yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang Undang Nomor 30 tahun 2004. Karena dalam mengemban profesinya Notaris wajib bersikap seperti apa yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) Undang Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembuatan dan Penyelenggaraan tersebut bermula dari permintaan para penghadap PT Panca Logam Makmur, PT Panca Logam Nusantara, dan PT Anugrah Alam Buana Indonesia, lalu berlanjut kepada pemanggilan kepada tiga PT tersebut, dan Notaris memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham ini dilangsungkan. Namun dari prosedur tersebut Notaris Maria Regina Tjendra Salim, SH tidak melakukannya sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 75 sampai dengan Pasal 91 Undang Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

<hr>

In Indonesia, the notary is an institution that has been known in our life in Indonesia. By its duties performances, Notary must hold on to the code of ethics of profession. Notary responsible for the acts she made, for example the Act of General Meeting of Shareholders. Based on this background, the subject matter in this thesis is: How Notary obligation in terms of the Act of Preparation General Meeting of Shareholders of PT Panca Logam Makmur? How the Implementation and Development Notary Act by the General Meeting of Shareholders of PT Panca Logam Makmur? The author uses normative juridical study method, with secondary data material and supported legal source of primary, secondary, tertiary, and the study of literature to collect data of this thesis.

Results of the analysis concluded that the Notary does not perform the obligations in making General Meeting of Shareholders. Notary in this fully aware, and trustworthy in carrying out its obligations as what is stated in Article 16 paragraph 1 letter (a) of Law No. 30 of 2004. As in carrying out its profession, Notary shall acts as what is stated in Article 16 paragraph (1) of the Law No. 30 of 2004 on Notary profession. Preparation and Implementation of the demand stems from the parties PT Panca Logam Makmur, PT Panca Logam Nusantara and PT Alam Anugrah Buana Indonesia, and continues to calling for the meeting for the three PT, and Notary checks the completeness of the required documents before the General Meeting of Shareholders was held. According to the provisions of Article 75 through Article 91 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, Notary Maria Regina Tjendra Salim, SH did not fit with the provisions Articles 75 until 91 of Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company.